

PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERUBAHAN DANA BAGI HASIL, DAN PERUBAHAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERUBAHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh)

¹⁾ Amran, ²⁾ Dr. Darwanis, M. Si, Ak, ³⁾ Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak

¹⁾ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3)} Staff Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstract: *This research aims to; (1) examine the effect of changes local revenue, changes profit sharing fund, and changes remaining balance budget together to changes social assistance expenditure to the Government of districts/cities in Aceh. (2) Examine the effect of changes local revenue, changes profit sharing fund, and changes remaining balance budget individually to changes social assistance expenditure districts/cities in Aceh. The object of this study is pure budget data and budget data changes for 2010-2014 in Local Government Financial Statements 23 districts/cities in Aceh. Source of data used are secondary data, namely documents obtained from the Office Property Aceh, Province Aceh. While research data collection techniques done with documentation techniques. The analytical method used is the Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that; (1) Changes local revenue, changes profit sharing fund, and changes remaining balance budget affect jointly to changes social assistance expenditure districts/cities in Aceh. (2) Changes local revenue, changes profit sharing fund, and changes remaining balance budget affect separately to changes social assistance expenditure districts/cities in Aceh.*

Keyword: *Local Revenue, Profit Sharing Fund, Remaining Balance Budget, Social Assistance Expenditure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menguji pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. (2) Menguji pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara sendiri-sendiri terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Objek penelitian ini adalah data anggaran murni dan data anggaran perubahan periode 2010-2014 pada 23 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Kekayaan Aceh (DKA) Provinsi Aceh. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. (2) Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara terpisah terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Kata kunci: **Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Bantuan Sosial**

PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah

satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, regulasi

tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Qanun) yang merupakan sebuah bentuk kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Abdullah dan Halim, 2006).

Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Setelah APBD dilaksanakan, selama periode berjalan akan terjadi perubahan-perubahan asumsi, sehingga APBD harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian APBD dilakukan dengan merubah jumlah angka dalam pendanaan, belanja dan pembiayaan. Anggaran dapat mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

Menurut Abdullah (2013b), perubahan APBD (APBDP) merupakan proses penganggaran yang menunjukkan upaya Pemda dalam menyesuaikan rencana keuangannya seiring perkembangan yang terjadi. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran namun juga bisa penurunan anggaran penerimaan maupun pengeluaran. Perubahan dalam struktur APBD memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda.

Salah satu komponen perubahan APBD yang sering menjadi sorotan adalah perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini dikarenakan pentingnya bantuan sosial sebagai penunjang keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah dan membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Pemberian bantuan sosial dalam

perekonomian berpengaruh terhadap pembangunan dan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Samsudin, Kusuma, dan Djaya, 2014).

Kenyataannya, belanja bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat belum terealisasi secara utuh. Hal ini terjadi karena ada yang tidak sesuai dengan prosedur penganggaran, tidak transparan dalam proses perencanaan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, sampai dana hibah dan bantuan sosial yang muncul tiba-tiba saat anggaran hendak disahkan.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung dalam hal ini belanja bantuan sosial. Beberapa bentuk perubahan alokasi belanja berdasarkan penyebabnya adalah; perubahan karena adanya varian (senjangan) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran); perubahan karena adanya pergeseran anggaran (virement); dan perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan (Abdullah, 2013b).

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Tujuan penelitian selanjutnya untuk menguji pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara sendiri-sendiri terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada

Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Regulasi tentang belanja bantuan sosial telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut dalam Pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Definisi belanja bantuan sosial mirip dengan definisi *social assistance benefit* yang diatur oleh *Government Finance Statistic Manual* (2001) (dalam Darmastuti dan Setyaningrum, 2012), yakni manfaat (*benefit*) dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan terhadap risiko sosial. Oleh karena itu, bantuan sosial sering diasosiasikan dengan *social assistance*.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) No. 10 menyebutkan bahwa mekanisme pengalokasian belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang memenuhi seluruh kriteria dari sisi pengertian, tujuan persyaratan penerima, pemberi dan sifat. Perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan titik awal dalam proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik dari

klasifikasi, peruntukan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran tersebut (Fauzi, 2014).

Perubahan Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Abdullah (2014) menguraikan perubahan atas pendapatan terutama PAD, bisa saja dilatarbelakangi perilaku oportuniste para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD).

Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.

Perubahan Dana Bagi Hasil

Darise (2008:38) mendefinisikan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah “dana yang bersumber dari APBN yang dibagi dihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan

memperhatikan potensi daerah penghasil”.

Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Dana Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (Wandira, 2013).

Perubahan DBH sangat penting karena merupakan dana yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah. Artinya, jika ada perubahan (penambahan) alokasi DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka perubahan penerimaan tersebut tidak terikat untuk membiayai kegiatan atau program tertentu (*earmark*). Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut dibelanjakan (Abdullah dan Ronna, 2015).

Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Permendagri No.13/2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan, yang ditanggung dalam perubahan APBD (Fathony, 2011).

Abdullah (2013b) menjelaskan bahwa perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA.

Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SiLPA bernilai nol atau nihil), maka varian SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja (Abdullah, 2013b).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada

LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sedangkan unit analisis penelitian adalah data anggaran murni dan data anggaran perubahan periode 2010-2014 pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kekayaan Aceh (DKA) Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data anggaran murni dan data anggaran perubahan.

Operasionalisasi Variabel

Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Y)

Perubahan belanja bantuan sosial merupakan perubahan yang dilakukan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan dan atau prioritas daerah.

Perubahan Belanja Bantuan Sosial diukur dengan cara menghitung selisih antara Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan APBD dengan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Perubahan PAD adalah perubahan atas potensi yang ada pada daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan PAD diukur dengan cara menghitung selisih antara PAD setelah perubahan APBD dengan anggaran PAD dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Perubahan Dana Bagi Hasil (X₂)

Perubahan Dana Bagi Hasil merupakan perubahan dan penetapan jumlah DBH oleh Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebelum penetapan APBD dan pada saat APBD dilaksanakan.

Perubahan DBH diukur dengan cara menghitung selisih antara DBH setelah perubahan APBD dengan anggaran DBH dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X₃)

Perubahan SiLPA adalah perubahan atas sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan.

Perubahan SiLPA diukur dengan cara menghitung selisih antara SiLPA setelah perubahan APBD dengan anggaran SiLPA dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.

Rancangan pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (perubahan PAD, perubahan DBH dan perubahan SiLPA) terhadap variabel dependen (belanja bantuan sosial) dilakukan dengan dua cara yaitu: uji secara bersama-sama dan uji secara terpisah.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Observasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah 23 Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Aceh periode 2010-2014. Unit analisis penelitian ini merupakan data anggaran murni dan data anggaran perubahan (APBDP) untuk Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan belanja bantuan sosial.

Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 84 LKPD yang mengalami perubahan (tidak bernilai nol) terhadap keempat variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik atas data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dari pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap perubahan belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

| |
|---|
| Persamaan Regresi $Y_{lit} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$ |
| $Y = 15,948 + 0,066 X_{1it} + 0,039 X_{2it} + 0,120 X_{3it}$ |
| $R = 0,199$ |
| $R^2 = 0,040$ |

Melalui hasil program SPSS maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_{lit} = 15,948 + 0,066 X_{1it} + 0,039 X_{2it} + 0,120 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Secara

Bersama-sama terhadap Belanja Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perubahan PAD, perubahan DBH, dan perubahan SiLPA secara bersama-sama terhadap perubahan belanja bantuan sosial dengan nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,040.

Artinya bahwa variabel perubahan PAD, perubahan DBH, dan perubahan SiLPA mampu menjelaskan variasi dari variabel perubahan belanja bantuan sosial sebanyak 4%. Sisanya sebesar 96% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Secara Terpisah terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Hasil pengujian secara terpisah dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai koefisien regresi (β) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $\beta_1 = 0,066$, dan $\beta_2 = 0,039$, dan $\beta_3 = 0,120$.

Hasil tersebut mendukung hipotesis kedua yang telah dirumuskan yaitu perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara terpisah terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PAD, perubahan DBH, dan perubahan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

Alasan terjadi perubahan APBD dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya disebabkan faktor finansial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran.

Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan PAD yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk “merekomendasikan” penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013b).

Selain penerimaan PAD, volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak, dengan demikian daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni dan Adi, 2009).

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah cara pemerintah daerah dalam

mendapatkan dana bantuan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja bantuan sosial yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula (Wandira, 2013)

Selanjutnya, salah satu alasan utama perubahan APBD adalah telah diketahuinya secara pasti (definitif) besaran angka SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada pertengahan tahun berjalan. Artinya, sisa uang dikas daerah bisa dialokasikan kembali (rebudgeting) ke dalam tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, besaran SiLPA definitif akan mempengaruhi perubahan alokasi anggaran belanja daerah (Abdullah, 2013c).

Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh. Artinya bila perubahan PAD meningkat Rp 1 maka perubahan belanja bantuan sosial akan meningkat pula sebesar Rp 0,066.

Hal tersebut bermakna bahwa perubahan atas PAD ikut meningkatkan anggaran belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial merupakan bagian APBD yang dialokasikan di dalam belanja tidak langsung. Tujuan dari keberadaan belanja bantuan sosial adalah untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen

keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat apabila daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya pelayanan minimum yang telah ditetapkan pemerintah (Ritonga, 2009).

Di Aceh, selain untuk belanja bantuan sosial, alokasi anggaran PAD juga untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai. Hal tersebut karena belanja pegawai akan diharapkan meningkatkan kinerja aparatur daerah untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi di daerah sehingga sumber penting penerimaan daerah yaitu PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non-fisik (Ifrizal, 2015).

Abdullah (2013b) menyatakan bahwa perubahan atas pendapatan terutama PAD, bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunistik para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD).

Pengaruh Perubahan Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DBH berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh.

Diperoleh hubungan yang positif antara perubahan DBH dengan perubahan belanja bantuan sosial. Hal ini bermakna bahwa pengalokasian anggaran DBH (DBH pajak dan DBH bukan pajak) yang ditetapkan Pemda ikut ditujukan untuk alokasi anggaran belanja bantuan sosial.

Ketetapan belanja bantuan sosial telah tertuang dalam Permendagri No. 59/2007, Permendagri No. 32/2011 dan Bultek SAP No. 10, dimana tujuan belanja bantuan sosial adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu cara Pemda untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial adalah dengan meningkatkan anggaran belanja bantuan sosial.

Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh.

Hal tersebut bermakna bahwa Pemda telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat.

SiLPA diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja daerah untuk pengeluaran belanja bantuan sosial masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD

hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat (Martunis, 2014).

SiLPA itu sendiri merupakan gambaran efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara terpisah terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah, Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang lain, seperti Dana Otsus, DAU, DAK, dana transfer lainnya, maupun data non keuangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, untuk terus menggali potensi penerimaan PAD sehingga dapat meningkatkan total penerimaan pendapatan daerah yang diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah itu sendiri, serta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bentuk penyaluran pelayanan publik. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, sebaiknya Pemda lebih meningkatkan anggaran DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja bantuan sosial. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, untuk lebih memperhatikan besar kecilnya SiLPA, mengingat besaran SiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syukriy. 2013b. *Perubahan APBD*. Artikel online melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01>. Diakses 20/03/2015.
- Abdullah, Syukriy. 2013c. *Pengaruh SiLPA terhadap Belanja*. Artikel online melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01>. Diakses 20/03/2015.
- Abdullah, Syukriy. 2014. *Belanja Bantuan Sosial*. Artikel online melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01>. Diakses 20/03/2015.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*.
- Abdullah, Syukriy dan Riza Rona. 2015. *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota*

di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada konferensi Regional Akuntansi II IAI Wilayah Jawa Timur*, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April.

- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT*, IV-03.
- Darmastuti, Dewi dan Dyah Setyaningrum. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2009*. Penelitian, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Fathony, Adi Dicka. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. Artikel online melalui eprints.undip.ac.id. Diakses 20/03/2015.
- Fauzi, Teuku. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Aceh. *Tesis*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Ifrizal. 2015. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai. *Tesis*. Pascasarjana Unsyiah.
- Martunis. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Tesis*. Pascasarjana Unsyiah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ritonga, Irwan Taufik. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*, Tesis. Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Samsudin, Muhamad, Aji Ratna Kusuma dan Suarta Djaya. 2014. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Administrative Reform*. Vol. 1, No. 2: 783-794.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber: *The 3rd National Conference UKWMS*. Page 1. Surabaya. Artikel online melalui <https://priyohari.files.wordpress.com>. Diakses pada 20/03/2015.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Artikel online melalui <http://lib.unnes.ac.id>. Diakses pada 20/03/2015.